



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;

Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V Penutup

- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - b. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - c. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - d. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - e. Renja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2022;
 - f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - g. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - h. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - i. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - j. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - k. Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - l. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - n. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - o. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - p. Renja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - q. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - r. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - s. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - t. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
 - u. Renja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;

- v. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- w. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- x. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- y. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- z. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- aa. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- bb. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- cc. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- dd. Renja Kecamatan Langkahan Tahun 2022;
- ee. Renja Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2022;
- ff. Renja Kecamatan Seunuddon Tahun 2022;
- gg. Renja Kecamatan Baktiya Tahun 2022;
- hh. Renja Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2022;
- ii. Renja Kecamatan Lhoksukon Tahun 2022;
- jj. Renja Kecamatan Cot Girek Tahun 2022;
- kk. Renja Kecamatan Paya Bakong Tahun 2022;
- ll. Renja Kecamatan Pirak Timu Tahun 2022;
- mm. Renja Kecamatan Matangkuli Tahun 2022;
- nn. Renja Kecamatan Tanah Luas Tahun 2022;
- oo. Renja Kecamatan Nibong Tahun 2022;
- pp. Renja Kecamatan Lapang Tahun 2022;
- qq. Renja Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2022;
- rr. Renja Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2022;
- ss. Renja Kecamatan Samudera Tahun 2022;
- tt. Renja Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2022;
- uu. Renja Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2022;
- vv. Renja Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2022;
- ww. Renja Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2022;
- xx. Renja Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2022;
- yy. Renja Kecamatan Dewantara Tahun 2022;
- zz. Renja Kecamatan Nisam Antara Tahun 2022;
- aaa. Renja Kecamatan Nisam Tahun 2022;
- bbb. Renja Kecamatan Banda Baro Tahun 2022;
- ccc. Renja Kecamatan Muara Batu Tahun 2022;

ddd. Renja Kecamatan Sawang Tahun 2022;

eee. Renja Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;

fff. Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

ggg. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

hhh. Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021.

- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

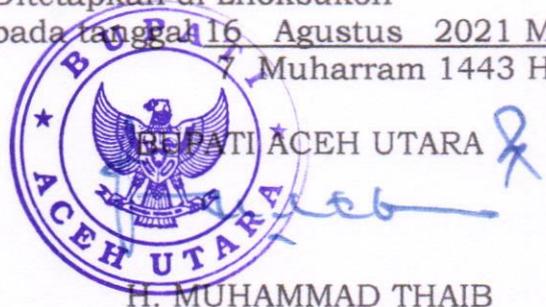
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKA Tahun 2022.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

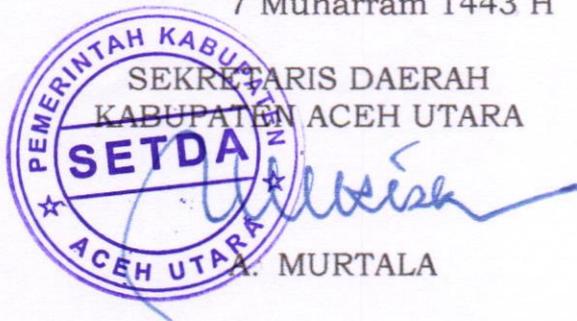
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Agustus 2021 M
7 Muharram 1443 H



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Agustus 2021 M
7 Muharram 1443 H



A. MURTALA